



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN
DAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN**

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan



deputi4@kemenkoinfra.go.id

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

Periode Oktober – Desember 2024

Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Jakarta, Januari 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2024 telah dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan serta bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja periode Oktober – Desember 2024. Selain itu, laporan ini berfungsi sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif, perwujudan transparansi, serta instrumen pengendalian dan pemacu dalam rangka meningkatkan kinerja seluruh unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman.

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan baru dibentuk pada Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024. Sejalan dengan hal tersebut, fokus kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman sebagai unit kerja pelaksana pada Kementerian Koordinator di masa awal kabinet pemerintahan ini adalah koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian *Quick Wins* di bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Tahun 2024 Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman dapat bermanfaat serta memberikan gambaran atas capaian program dan kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman.

Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan dan kesehatan untuk terus bekerja dan berkarya dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan bangsa.

a.n. Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan
dan Sarana dan Prasarana Permukiman,
Sekretaris Deputy,

Novia Fitriyati

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
Daftar Isi	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	3
C. Aspek Strategis	7
D. Isu Strategis	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis	10
1. Visi	10
2. Misi	10
3. Tujuan	11
4. Sasaran Program	11
B. Target Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Progres <i>Quick Wins</i>	13
1. Pemanfaatan Tanah Idle untuk Perumahan	13
2. Peresmian dan Percepatan Pemanfaatan Rusun	14
3. Perbaikan Kualitas Rumah Dengan Skema Bsp	14
5. Perkuatan Kolaborasi Dengan <i>Stakeholders</i> Perumahan	17
6. Persiapan Pembangunan 3 Juta Rumah Baru	19
7. Rumah Khusus bagi Pejuang eks Timor Timur	20
B. Realisasi Anggaran	21
C. Efisiensi Sumber Daya	22
BAB IV PENUTUP	24
A. Kesimpulan	24
B. Tindak Lanjut	24

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja memuat pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil analisis pengukuran kinerja. Laporan Kinerja ini dalam penyusunannya mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Sebagai unit kerja di Kementerian Koordinator yang baru terbentuk pada Kabinet Merah Putih di Oktober 2024, fokus kinerja yang dilaporkan pada laporan kinerja ini meliputi *Quick Wins* di bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman. Secara bersamaan perencanaan kinerja yang lebih komprehensif meliputi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan tengah disiapkan menyesuaikan dengan program Asta Cita Kabinet Merah Putih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 – 2029.

Adapun progres *Quick Wins* bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman yang dilaporkan pada Laporan ini meliputi:

1. Pemanfaatan Tanah Idle untuk Perumahan
2. Persemian dan Percepatan Pemanfaatan Rusun
3. Perbaikan Kualitas Rumah Dengan Skema BSPS
4. Perkuatan Kolaborasi Dengan Stakeholders Perumahan
5. Persiapan Pembangunan 3 Juta Rumah Baru
6. Status Rumah Khusus (Rhusus) bagi Pejuang eks Timor Timur

Hingga akhir 2025, semua *Quick Wins* di atas telah dilakukan koordinasi sinkronisasi dan pengendalian sehingga telah terdapat progres signifikan. Program *Quick Wins* ini berfungsi sebagai pijakan awal untuk program jangka panjang dalam pembangunan perumahan yang berkelanjutan. Dengan adanya pencapaian cepat dan terukur, diharapkan dapat menarik investasi dan kolaborasi dari sektor swasta maupun masyarakat, sehingga menciptakan ekosistem pembangunan perumahan yang lebih inklusif dan terjangkau dan berkelanjutan.

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LKj) Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Saranan Permukiman disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama (periode Oktober – Desember) 2024. Laporan ini menjelaskan pelaksanaan *Quick Wins* di bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman pada periode Oktober s.d Desember 2024.

A. Latar Belakang

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membentuk Kabinet Merah Putih dengan mengusung visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045." Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan delapan misi utama yang disebut Asta Cita. Asta Cita mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari penguatan ideologi dan demokrasi, hingga memperkuat sistem pertahanan negara. Selain itu, Asta Cita juga fokus dalam mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan pengembangan ekonomi kreatif. Tidak terlewatkan dalam pentingnya pengembangan sumber daya manusia, percepatan hilirisasi dan industrialisasi, serta penciptaan lebih banyak lapangan kerja. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi turut menjadi bagian dari prioritas mereka dalam membangun Indonesia yang lebih maju. Berikut 8 misi yang disebut Asta Cita:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melalui Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman turut mendukung Astha Cita dengan sasaran peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan **melanjutkan pengembangan infrastruktur** (Asta Cita nomor 3), **membangun dari desa** dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan (Asta Cita nomor 6), serta memperkuat **penyelarasan kehidupan yang harmonis** dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur (Asta Cita nomor 8).

Untuk mendukung Asta Cita tersebut, program kerja sektor perumahan dan sarana dan prasarana permukiman bertujuan untuk meningkatkan akses hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Melalui penyediaan perumahan terintegrasi dengan prasarana dan utilitas, program ini mencakup pembangunan baru, peremajaan kawasan permukiman, serta bantuan untuk rumah khusus dan PSU (Prasarana dan Sarana Utilitas). Dengan fokus pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi seluruh segmen masyarakat, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pekerja informal.

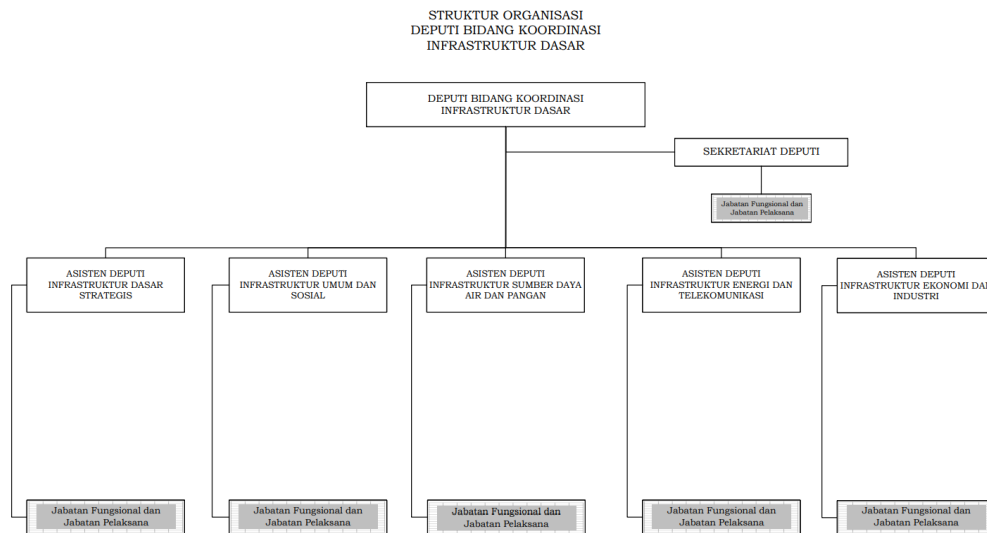
Untuk mewujudkan program kerja tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman.

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman merupakan unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator dan dipimpin oleh Deputy, dengan susunan organisasi terdiri:

1. Sekretariat Deputy;
2. Asisten Deputy Peningkatan Akses Perumahan;
3. Asisten Deputy Penyediaan Lahan Perumahan;
4. Asisten Deputy Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman;
5. Asisten Deputy Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
6. Asisten Deputy Pembangunan Perumahan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal.

Susunan Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman terlihat pada Gambar 1. 1 berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman

Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman. Dalam melaksanakan tugas,

Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman;
- e. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Sekretariat Deputi

Sekretariat Deputi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman. Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
- b. koordinasi pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja;
- c. pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi;
- d. pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kearsipan, dan keuangan;
- e. pemberian dukungan layanan pimpinan, pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara;
- f. koordinasi penyusunan laporan; dan
- g. koordinasi dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Asisten Deputy Peningkatan Akses Perumahan

Asisten Deputy Peningkatan Akses Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan akses perumahan. Asisten Deputy Peningkatan Akses Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan akses perumahan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan akses perumahan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan akses perumahan.

Asisten Deputy Penyediaan Lahan Perumahan

Asisten Deputy Penyediaan Lahan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penyediaan lahan perumahan. Asisten Deputy Penyediaan Lahan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang penyediaan lahan perumahan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penyediaan lahan perumahan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan lahan perumahan.

Asisten Deputy Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman

Asisten Deputy Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan dan penataan kawasan permukiman. Asisten Deputy Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan dan penataan kawasan permukiman;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan dan penataan kawasan permukiman; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan penataan kawasan permukiman.

Asisten Deputi Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Asisten Deputi Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembiayaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Asisten Deputi Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembiayaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembiayaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembiayaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Asisten Deputi Pembangunan Perumahan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal

Asisten Deputi Pembangunan Perumahan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Pembangunan Perumahan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal. Asisten Deputi Pembangunan Perumahan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan perumahan transmigrasi dan daerah tertinggal;

- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan perumahan transmigrasi dan daerah tertinggal; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembangunan perumahan transmigrasi dan daerah tertinggal.

C. Aspek Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman mempunyai aspek strategis sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029 dalam mendukung penyediaan perumahan yang layak, terjangkau dan berkelanjutan. Aspek strategis ini dicapai melalui koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman.

Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian isu-isu strategis di bidang investasi dan pertambangan diarahkan untuk mempercepat:

- a. Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan prasarana, sarana, dan utilitas dilakukan dengan pembangunan baru yang berasal dari bantuan *stimulant* perumahan swadaya dan rumah khusus, peningkatan kualitas dengan memberikan peremajaan kawasan permukiman, PSU rumah umum dengan memberikan bantuan PSU perumahan
- b. Pengembangan perumahan publik vertikal yang terpadu dengan menyediakan unit hunian *vertical* pemerintah, badan usaha, sewa, ataupun skema *backyarding*
- c. Pengembangan fasilitasi pembiayaan perumahan terutama untuk Masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan membangun rumahnya secara mandiri
- d. Penguatan ekosistem perumahan untuk tercapainya pemenuhan 100 persen akses rumah tangga terhadap rumah yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar permukiman (air minum, air limbah, dan persampahan)
- d. Peremajaan dan penanganan permukiman kumuh yang terpadu dengan mengoptimalkan antara intervensi penyediaan perumahan dengan infrastruktur dasar permukiman dan akses transportasi publik yang berpotensi pada tumbuhnya permukiman kumuh baru

Aspek strategis tersebut diwujudkan dengan melalui perbaikan tata kelola yang baik dan tercapainya kinerja target kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang sudah ditetapkan, yaitu dengan pencapaian Sasaran Program berikut:

1. Terwujudnya Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Mudah Diakses, Terjangkau dan Berkelanjutan;
- e. Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Berkualitas;
- f. Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Efektif dan Efisien.

D. Isu Strategis

Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman berperan dalam mewujudkan pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman yang mudah diakses, terjangkau dan berkelanjutan melalui penyelesaian permasalahan, penyusunan regulasi, dan perbaikan kebijakan di bidang pembangunan perumahan dan sarana permukiman. Dalam upaya mewujudkan sasaran program Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman, maka program kerja dan kegiatan ditekankan pada:

1. Penyediaan Hunian Tapak, dan Vertikal yang terintegrasi melalui Transit-Oriented Development (TOD)/Transit-Oriented Affordable Housing (TOAH);
2. Penataan Kawasan Pesisir Akibat Dampak Perubahan Iklim;
3. Pembentukan Kelembagaan Satgas Kebijakan Prioritas Sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Penyediaan lahan melalui pemanfaatan tanah *idle*;
5. Pengembangan dan Penataan Kawasan Hunian ASN, TNI dan Polri;
6. Percepatan Pemanfaatan Rumah Susun;
7. Pengembangan *Creative Financing* menggunakan skema KPBU, Sekuritisasi KPR, dan skema lainnya.;
8. Penataan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Transmigrasi di 5 Lokasi KTPN Ketahanan Pangan;
9. Penguatan Strategi Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik.

10. Penyediaan Platform Sistem Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Perumahan dan Sarpras Permukiman.;
11. Penguatan Peran Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Dewan Nasional KEK, KPPIP, dan KPBU.

E. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja ini secara umum menginformasikan capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman pada tahun 2024. Untuk memudahkan pemahaman, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Bab I: Pendahuluan. Bab satu menyajikan penjelasan umum mengenai kedudukan Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman, identifikasi aspek strategis dan isu strategis yang merupakan masalah yang dihadapi, dan sistematika penulisan.
- b. Bab II: Perencanaan Kinerja. Bab ini menjelaskan secara ringkas keterkaitan antar dokumen perencanaan dan penentuan indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Bab ini terdiri dari rencana strategis, target kinerja, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja.
- c. Bab III: Akuntabilitas Kinerja. Bab ini menjelaskan capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman disertai dengan analisis keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Program berikut dengan realisasi anggaran yang dipergunakan untuk mencapai kinerja tersebut.
- d. Bab IV: Penutup. Bab ini sebagai penutup yang akan menguraikan kesimpulan terhadap pencapaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman. Bab ini juga memuat rekomendasi untuk perbaikan pada laporan kinerja tahunan selanjutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sebagai unit kerja di Kementerian Koordinator yang baru terbentuk pada Kabinet Merah Putih di Oktober 2024, proses perencanaan kinerja yang lebih komprehensif meliputi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan tengah disiapkan menyesuaikan dengan program Asta Cita Kabinet Merah Putih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 – 2029 yang akan diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Adapun perencanaan kinerja mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

1. Visi

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini menegaskan agar putra-putri terbaik bangsa dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama untuk menuju Indonesia Maju. Membangun bangsa dengan dasar fondasi kuat yang dibangun oleh kepemimpinan sebelumnya dengan tujuan yang jelas, yaitu Indonesia Emas, negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045 atau lebih cepat.

2. Misi

Visi tersebut dituangkan dalam pembangunan nasional bertumpu pada delapan Asta Cita yang menjadi landasan utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Pembangunan nasional bertumpu pada delapan Asta Cita yang menjadi landasan utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) menjadi langkah awal dalam memastikan nilai-nilai kebangsaan tetap kuat. Di sisi lain, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan pembangunan. Upaya meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong

kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur terus dilakukan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam aspek sumber daya manusia, penguatan pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas menjadi fokus utama untuk meningkatkan daya saing bangsa. Selain itu, hilirisasi dan industrialisasi terus dilanjutkan demi meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pembangunan dari desa dan dari bawah menjadi strategi dalam pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi juga diperkuat, termasuk pencegahan serta pemberantasan korupsi dan narkoba, demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Terakhir, penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama menjadi kunci dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melalui Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman turut mendukung Asta Cita dengan sasaran peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan **melanjutkan pengembangan infrastruktur** (Asta Cita nomor 3), **membangun dari desa** dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan (Asta Cita nomor 6), serta memperkuat **penyelarasan kehidupan yang harmonis** dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur (Asta Cita nomor 8).

3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan, maka tujuan Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025-2029 adalah Mewujudkan Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Mudah Diakses, Terjangkau dan Berkelanjutan.

4. Sasaran Program

Sasaran Program merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil dari satu atau beberapa program. Sasaran Program yang dirumuskan sama dengan sasaran pembangunan yang ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 maupun RPJPN tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dari sasaran pembangunan yang

terdapat pada RPJMN tetapi tetap sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman diharapkan memberikan kontribusi pencapaian sasaran Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi dalam mendukung tercapainya visi-misi sesuai Asta Cita melalui koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian indikator pembangunan “Terwujudnya Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Mudah Diakses, Terjangkau dan Berkelanjutan”.

B. Target Kinerja

Sebagai unit kerja di Kementerian Koordinator yang baru terbentuk pada Kabinet Merah Putih di Oktober 2024, fokus kinerja yang dilaporkan pada laporan kinerja ini meliputi *Quick Wins* di bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman. Secara bersamaan perencanaan kinerja yang lebih komprehensif meliputi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan tengah disiapkan menyesuaikan dengan program Asta Cita Kabinet Merah Putih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 – 2029. Adapun *Quick Wins* bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman yang dilaporkan pada Laporan ini disampaikan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 1. 1 Quick Wins Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana Permukiman

No	Program Quick Wins	Kementerian/Lembaga yang Terlibat
1	Pemanfaatan Tanah <i>Idle</i> untuk Perumahan	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Peresmian dan Percepatan Pemanfaatan Rusun	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum.
3	Perbaikan Kualitas Rumah Dengan Skema BSPS	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Keuangan
4	Perkuatan Kolaborasi Dengan <i>Stakeholders</i> Perumahan	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lembaga Pembiayaan
5	Persiapan Pembangunan 3 Juta Rumah Baru	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Keuangan
6	Status Rumah Khusus (Rhusus) bagi Pejuang eks Timor Timur	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Progres *Quick Wins*

1. Pemanfaatan Tanah Idle untuk Perumahan

Pemanfaatan tanah idle untuk perumahan merupakan langkah strategis dalam mengatasi keterbatasan lahan perkotaan dan memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat. Tanah idle, yang merupakan lahan tidak produktif atau belum dimanfaatkan secara optimal, dapat dialokasikan untuk pembangunan rumah bagi pegawai negeri, aparat keamanan, serta masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan pemanfaatan yang tepat, tanah tersebut bisa menjadi solusi untuk mengurangi backlog perumahan sekaligus mengoptimalkan aset negara agar lebih bernilai guna. Selain itu, penggunaan tanah idle juga dapat mendukung kebijakan tata ruang yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan pemerataan hunian.

Tantangan utama dalam pemanfaatan tanah idle adalah perlunya kepastian hukum yang dapat memberikan jaminan bagi pengembang dan investor. Selain itu, percepatan implementasi proyek juga menjadi kendala, di mana proses yang lambat dapat menghambat pengembangan infrastruktur yang diperlukan. Terakhir, lokasi lahan dan nilai strategis yang belum teridentifikasi mengakibatkan kesulitan dalam merencanakan penggunaan tanah secara efektif.

TINDAK LANJUT: Untuk mengatasi tantangan tersebut, penyusunan regulasi seperti Perpres Penugasan BUMN dan petunjuk teknis akan dilakukan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas. Pembentukan tim khusus yang melibatkan berbagai instansi, termasuk APH, TNI, Polri, dan Kemenkeu, juga akan dilakukan untuk mempercepat proses identifikasi dan prioritas potensi sumber lahan. Rapat terbatas akan diadakan untuk mendapatkan arahan terkait kepastian regulasi dan pendanaan, serta rakor tiga bulanan tingkat Menteri untuk memantau progres dan penanganan isu.

CAPAIAN: Progres yang telah dicapai mencakup konsolidasi penyusunan draft regulasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait, seperti Perumnas, PT KAI, dan Kemenkeu/DJKN. Selain itu, penyusunan agenda dalam rencana aksi juga telah dilakukan untuk memastikan langkah-langkah yang jelas dalam pengembangan perumahan. Koordinasi substansi regulasi dengan stakeholder terus dilakukan untuk memastikan semua pihak terlibat dalam proses pengembangan yang efektif dan efisien.

2. Peresmian dan Percepatan Pemanfaatan Rusun

Pembangunan rumah susun memiliki peran penting dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), serta anggota TNI dan Polri. Dengan keterbatasan lahan di perkotaan, rumah susun menjadi solusi efektif untuk mengoptimalkan penggunaan lahan dengan tetap menjaga aksesibilitas terhadap fasilitas umum dan tempat kerja. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, rumah susun memberikan alternatif hunian yang lebih terjangkau dibandingkan rumah tapak, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Selain itu, konsep rumah susun juga mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan mengurangi *urban sprawl* dan meningkatkan efisiensi penggunaan infrastruktur kota. Hunian yang terjangkau dan nyaman akan meningkatkan kesejahteraan serta stabilitas sosial bagi masyarakat. Selain itu, rumah susun bagi kelompok ini juga dapat memperkuat solidaritas serta mempercepat respons dalam situasi darurat, terutama bagi personel yang bertugas di sektor keamanan. Dengan kebijakan yang tepat, pengembangan rumah susun tidak hanya menjadi solusi perumahan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan efisiensi kerja, ketahanan sosial, dan keseimbangan pembangunan perkotaan.

Selama beberapa tahun terakhir Pemerintah telah melakukan pembangunan rumah susun di berbagai daerah. Adapun rumah susun tersebut disampaikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rumah Susun Penerima Manfaat Masyarakat Berpenghasilan Rendah

No	Nama	Alamat	Tipe Rusun	Tower	Unit	TA	Rusun Proses Pembangunan		Rekomendasi Peresmian
							Progres	Selesai Pembangunan	
SUDAH TERHUNI				5					
Provinsi Banten				1					
1	Rumah Susun Kedaung Baru Kota Tangerang	Jl. Kedaung Baru Kelurahan Kedaung Baru, Kec Neglasari, Kota Tangerang Banten	T. Khusus/5 lt	1	70	2022-2023	Pembangunan Selesai		Siap diresmikan
Provinsi Jawa Tengah				2					
2	Rumah Susun MBR Pemkot Surakarta	Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta	T. 36/3 lt	1	62	2022-2023	Pembangunan Selesai		Perlu diklarifikasi
3	Rumah Susun MBR Mojosongo Surakarta	Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta	T. 36/3 lt	1	62	2020-2021	Pembangunan Selesai		Perlu diklarifikasi
Provinsi Jawa Timur				1					
4	Rumah Susun MBR Kota Madiun	Jl. Hayam Wuruk Kel. Manguharjo, Kec. Manguharjo, Kota Madiun	T. 36/4 lt	1	60	2022-2023	Pembangunan Selesai		Siap diresmikan
Provinsi Sulawesi Utara				1					
5	Rumah Susun Penghargaan Kota Manado	Kota Manado, Sulawesi Utara	T. 36/4 lt	1	60	2022-2023	Pembangunan Selesai		Siap diresmikan

Tabel 3.2 Rumah Susun Penerima Manfaat ASN/Polri Kementerian / Lembaga

No	Nama	Alamat	Tipe Rusun	Tower	Unit	TA	Rusun Proses Pembangunan		Rekomendasi Peresmian
							Progres	Selesai Pembangunan	
SUDAH TERHUNI				6					
Provinsi Kepulauan Riau				6					
				1					
1	Pembangunan Rumah Susun Bakamla RI	Pulau Sekotok, Kota Batam Prov Kepri	T. 36/4 lt	1	60	2022-2023	Pembangunan Selesai		Siap diresmikan
Provinsi Kalimantan Timur				1					
2	Rumah Susun Perwakilan BPKP Samarinda Kalimantan Timur	Jl. Ir. H. Juanda 2 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda	T. 36/4 lt	1	60	2022-2023	Pembangunan Selesai		Siap diresmikan
Provinsi Jawa Tengah				1					
3	Rumah Susun TNI AL Semarang	Kota Semarang, Jawa Tengah	T. Wisma / Arunika 36 / 3.Lt	1	44	2023-2024	Pembangunan Selesai		Perlu diklarifikasi
Provinsi DI Yogyakarta				1					
4	Rumah Susun Tenaga Pendidik UGM	Gg. Kinanti Berek Kocoran Sinduadi Kec. Mlati Sleman, D.I. Yogyakarta	T. 36/6 lt	1	88	2022-2023	Pembangunan Selesai		Perlu diklarifikasi
Provinsi Gorontalo				1					
5	Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Gorontalo	Jl. Tinaloga No.3, Desa Toto Selatan, Kec. Kabila, Kab Bone Bolango	T. 36/3 lt	1	44	2022-2023	Pembangunan Selesai		Siap diresmikan
Provinsi Papua				1					
6	Rumah Susun Kementerian Keuangan Satker KPPBC Tipe Madya Pabean C Merauke	Jl. Ndorem Kai, Kel. Samkai, Kec. Merauke, Kab Merauke, Prov. Papua	T. 36/3 lt	1	44	2022-2023	Pembangunan Selesai		Siap diresmikan

Tabel 3.3 Rumah Susun Penerima Manfaat Peserta Didik

No	Nama	Alamat	Tipe Rusun	Tower	Unit	TA	Rusun Proses Pembangunan		Rekomendasi Peresmian
							Progres	Selesai Pembangunan	
SUDAH TERHUNI				6					
Provinsi Kalimantan Timur				6					
1	Pondok Pesantren Bairuha Manshurin Gunung Guntur	Kel. Gunung Sari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	T. Barak 2 lt	1	21	2023	Pembangunan Selesai		Siap diresmikan
Provinsi Jawa Timur				3					
2	Rumah Susun Universitas PGRI Ronggolawe	Jl. Manunggal No. 63A, Desa Gedongombo, Kec Semanding, Kab Tuban, Jawa Timur	T. 24/2 lt	1	13	2023	Pembangunan Selesai		Siap diresmikan
3	Yayasan Baitul Izza Tulungagung	Desa Serut, Kec. Boyolangun, Kab Tulungagung, Jawa Timur	T. Barak 2 lt	1	14	2023	Pembangunan Selesai		Siap diresmikan
4	Pondok Pesantren Bayt Al Hikmah	Jl. Pattinus No. 25, Kel. Krampyangan Kec. Bungul Kidul, Kota Pasuruan, Prov. Jawa Timur	T. Barak 2 lt	1	21	2023-2024	Pembangunan Selesai		Siap diresmika
Provinsi Maluku				1					
5	Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku	Jl. Dr Siwabesi, Kel. Wainitu, Kec. Nusanawe, Kota Ambon, Prov. Maluku	T. Barak/3 lt	1	32	2023-2024	Pembangunan Selesai		Siap diresmikan
Provinsi Papua Barat				1					
6	Rumah Susun Sekolah Tinggi Teologi GPI Papua Fakfak	Jl. Pattimura No. 1, Kec. Fakfak, Kab Fakfak, Prov. Papua Barat	T. Barak/3 lt	1	32	2023-2024	Pembangunan Selesai		Siap diresmikan

TINDAK LANJUT: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan telah melakukan kunjungan ke Rumah Susun Ranca Ekek dan Rawa Buaya dengan tindak lanjut mencakup monitoring dan evaluasi efektivitas kebijakan pemanfaatan Rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan tunawisma. Kebijakan yang diperlukan meliputi penyusunan regulasi seperti Perpres Penugasan BUMN dan petunjuk teknis, serta pembentukan tim khusus yang melibatkan berbagai instansi untuk mempercepat implementasi. Selain itu, identifikasi dan prioritasasi potensi sumber lahan serta rapat terbatas untuk mendapatkan arahan terkait kepastian regulasi dan pendanaan juga menjadi bagian penting dari tindak lanjut ini.



Gambar 3. 1 Penyerahan Kunci Rumah Susun Ranca Ekek oleh Menteri Koordinator

4. Perbaikan Kualitas Penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam meningkatkan kualitas rumah tinggal mereka. Program ini memberikan bantuan berupa dana stimulan yang dapat digunakan untuk memperbaiki. Pada tahun 2023, anggaran program BSPS dialokasikan sebesar Rp3,34 triliun dengan target peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 150.421 unit.

	PENERIMA BANTUAN			PENERIMA MANFAAT
	BSPS-Sejahtera	BSPS	SARHUNTA	BPPS
Status keluarga	WNI yang sudah berkeluarga			Masyarakat yang tinggal di delineasi lokasi
Lahan	Memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan yang jelas dan sah atau bukti penguasaan atau izin tinggal min. 10 tahun ke depan			Memiliki, menguasai, atau mendapat izin untuk menempati rumah dan/atau tanah dari pemilik dan diketahui oleh kepala desa/lurah
Rumah	Belum memiliki rumah, atau memiliki & menempati rumah satu-satunya dalam kondisi tidak layak min. 3 tahun	Memiliki & menempati rumah satu-satunya dalam kondisi tidak layak min. 3 tahun	Memiliki & menempati rumah satu-satunya min. 3 tahun	
Bantuan sejenis	Belum pernah memperoleh bantuan rumah swadaya dalam jangka waktu 10 tahun			-
Penghasilan	Penghasilan maks: 1/2 UMP/UMK	Penghasilan maks: UMP/UMK	Penghasilan maks: sesuai ketentuan penghasilan MBR (BP2BT Rumah Swadaya)	-
Ketentuan program	Bersedia mengikuti ketentuan program: - Berswadaya bagi yang mampu - Membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng - Mengikuti pembinaan ekonomi dan sosial			Bersedia mengikuti ketentuan program: - Mengikuti sosialisasi/rembuk warga - Mengikuti pembinaan - Bertanggung jawab memelihara rumah dan lingkungan

Sumber: SE Dirjen Perumahan No. 14/ 2022 tentang Juknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya

Gambar 3. 2 Skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

PROGRES DAN TINDAK LANJUT: Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana Permukiman telah melakukan identifikasi awal terhadap tantangan penyaluran BSPS. Transparansi dalam penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak dan digunakan sesuai dengan tujuannya. Pemerintah perlu menerapkan sistem pelaporan dan pengawasan yang ketat, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk memantau progres pembangunan rumah. Selain itu, keterlibatan pemerintah daerah, aparat pengawas, serta masyarakat dalam proses verifikasi dan evaluasi sangat diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan atau penyaluran yang tidak tepat sasaran. Publikasi data penerima manfaat serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses juga harus diperkuat agar masyarakat dapat mengawasi secara langsung dan melaporkan jika ada ketidaksesuaian. Dengan sistem yang transparan dan akuntabel, BSPS dapat berjalan lebih efektif dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah serta mendukung program perumahan nasional secara berkelanjutan.

5. Perkuatan Kolaborasi Dengan *Stakeholders* Perumahan

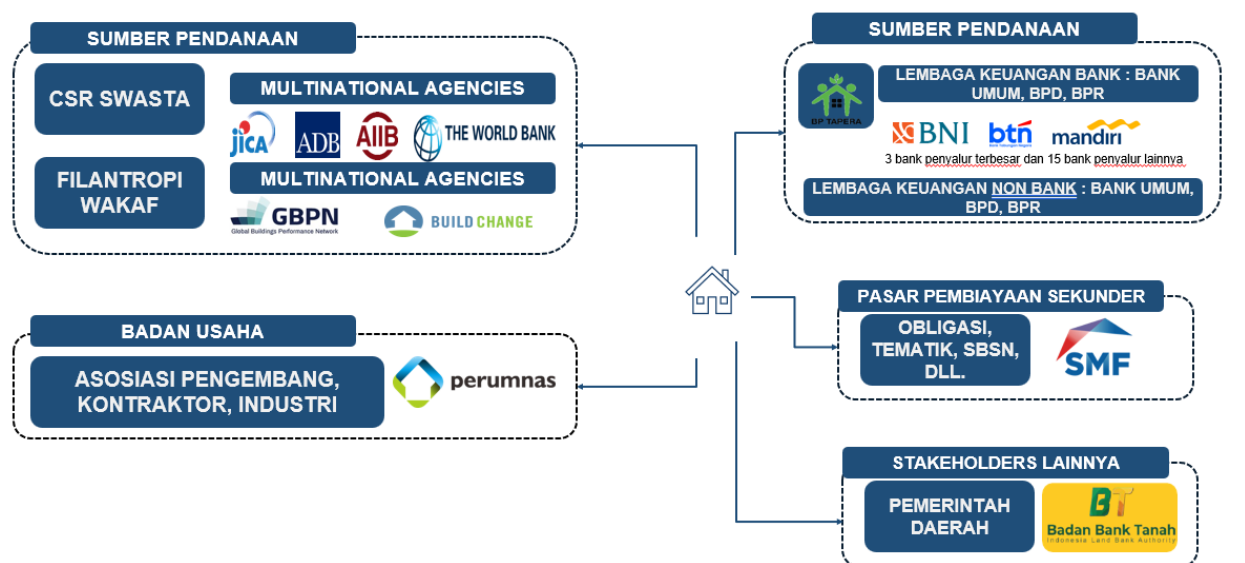
Kemitraan dalam pembiayaan perumahan merupakan langkah strategis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta, diharapkan dapat tercipta skema pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kerjasama ini juga bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah (MBR) yang sering kali terpinggirkan dari pasar perumahan.

Dalam upaya memperkuat kemitraan ini, berbagai inisiatif telah diluncurkan, termasuk penyediaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan subsidi angsuran KPR. Selain itu, penguatan peran Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) juga menjadi fokus utama untuk membantu pembiayaan melalui mekanisme konversi. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan dapat mempercepat pembangunan perumahan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Keberhasilan kemitraan dalam pembiayaan perumahan sangat bergantung pada sinergi antara semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ada, serta memperkuat komunikasi dan koordinasi antar lembaga. Dengan pendekatan yang kolaboratif, diharapkan target penyediaan 3 juta

rumah per tahun dapat tercapai, memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

PROGRES: Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman telah melakukan pertemuan dengan *stakeholder* perumahan. Pertemuan dengan PT SMF menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat skema pembiayaan sekunder yang dapat meningkatkan likuiditas pasar perumahan. Diskusi dengan PT PII menekankan pentingnya peran mereka sebagai penjamin dalam proyek-proyek perumahan, serta pengembangan skema KPBU yang lebih efektif. Sementara itu, kolaborasi dengan HDB Singapore memberikan wawasan berharga mengenai kebijakan perumahan inklusif dan terjangkau, yang dapat diadaptasi untuk konteks lokal, serta memperkuat kerjasama dengan Bappenas dalam merancang grand design pembangunan perumahan yang komprehensif.



Gambar 3. 3 Stakeholder Pembangunan Perumahan

TINDAK LANJUT: Pertemuan selanjutnya untuk Pengembangan ide terkait pembiayaan perumahan yang komprehensif kami akan menggali masukan dari JICA, OJK, BTN, Jamsostek, BPJS, serta consulting companies. Hal ini diperlukan untuk mendukung ide pembuatan *grand design* pembangunan perumahan yang mencakup seluruh elemen pada sisi supply dan demand. Grand design yang komprehensif ini diharapkan akan mempermudah masuknya investor untuk bersama-sama mengembangkan perumahan bagi MBR dan Non MBR..

6. Persiapan Pembangunan 3 Juta Rumah Baru

Program pembangunan 3 juta rumah merupakan inisiatif strategis untuk mengatasi kekurangan hunian di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah, ASN, serta anggota TNI/Polri. Program ini bertujuan untuk menyediakan akses perumahan yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di berbagai daerah, termasuk kawasan perkotaan dan perdesaan. Pentingnya pembangunan 3 juta rumah terletak pada dampaknya dalam mengurangi *backlog* perumahan, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor konstruksi, serta menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, program ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan memastikan hunian yang memiliki infrastruktur dan fasilitas publik yang memadai. Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, serta masyarakat, target pembangunan ini dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memenuhi kebutuhan perumahan di Indonesia.

Dalam Rapat Koordinasi Menteri Koordinator yang dihadiri oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah disampaikan bahwa target Pembangunan 3 juta rumah adalah 1 juta unit di perkotaan dan 2 juta unit di perdesaan setiap tahunnya. Untuk tahun anggaran 2025, sebanyak 257.431 unit rumah akan dibiayai melalui APBN, sementara sisanya, sebanyak 2.742.569 unit, akan dibangun melalui berbagai upaya tambahan. Program ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi *backlog* perumahan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor konstruksi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Untuk mencapai target tersebut, berbagai langkah strategis telah dirancang. Salah satunya adalah pemberian subsidi angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp 600.000 per bulan bagi dua juta unit rumah, yang memerlukan anggaran Rp 21,6 triliun per tahun serta penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukumnya. Selain itu, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) akan ditingkatkan dari 220.000 unit menjadi 280.000 unit, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 56,821 triliun. Langkah lainnya adalah mengintegrasikan pembangunan perumahan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di 30 titik moda transportasi, guna memastikan aksesibilitas dan keterjangkauan hunian bagi masyarakat.

Selain skema pembiayaan, pemerintah juga akan mendorong pembangunan perumahan berbasis swadaya dengan memberikan bantuan konsultasi dan desain gratis. Penyederhanaan perizinan serta perbaikan ekosistem pembangunan perumahan juga menjadi prioritas guna mempercepat proses konstruksi. Untuk mendukung pembiayaan, akan dibentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) yang bertugas membantu pendanaan melalui mekanisme konversi. Pemerintah juga berencana mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) guna mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Lebih lanjut, penguatan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) akan dilakukan guna meningkatkan likuiditas perbankan dalam menyalurkan kredit perumahan. Pemanfaatan dana desa juga akan dioptimalkan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni di daerah perdesaan. Selain itu, investasi dari luar negeri akan didorong untuk mempercepat realisasi program ini. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan target pembangunan 3 juta rumah per tahun dapat tercapai, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki hunian layak dan terjangkau.

7. Rumah Khusus bagi Pejuang eks Timor Timur

Rumah Khusus (Rusus) bagi Pejuang eks Timor Timur merupakan salah satu Major Project Nasional yang bertujuan menyediakan hunian layak bagi mantan pejuang Timor Timur yang kini menetap di Indonesia. Hingga Desember 2024, proyek ini telah mencapai 97% penyelesaian, dengan 2.100 unit rumah yang sebagian besar sudah siap dihuni. Sebanyak 1.600 unit telah memiliki sertifikat yang siap diserahkan kepada penerima manfaat, sementara fasilitas sosial (fasos), fasilitas umum (fasum), dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga telah selesai dibangun. Selain itu, infrastruktur dasar seperti jaringan listrik, pipa air minum, dan sistem pengolahan air telah berfungsi sepenuhnya.

Namun, proyek ini menghadapi beberapa kendala yang perlu segera diselesaikan sebelum peresmian. Salah satu tantangan utama adalah kondisi akses jalan menuju perumahan yang masih tidak layak untuk kendaraan roda empat. Jalan ini merupakan jalan kabupaten yang memerlukan perbaikan agar dapat mendukung mobilitas penghuni. Untuk jangka pendek, perbaikan sementara direncanakan guna mendukung acara peresmian, tetapi solusi permanen, seperti pembangunan struktur jalan beton atau aspal, masih membutuhkan diskresi dari Menteri PUPR atau melalui mekanisme Instruksi Presiden (Inpres) Jalan. Selain itu, 46 unit rumah terdampak banjir masih dalam proses perbaikan, dan pembangunan di Zona 4 dan 5 masih berlangsung.



Gambar 3. 4 Kondisi Jalan Menuju Kawasan Rumah Khusus Pejuang Timor-Timur

PROGRES DAN TINDAK LANJUT: Koordinasi secara intens telah dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Saranan dan Prasaranan Permukiman bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Daerah. Namun, koordinasi lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan seluruh infrastruktur pendukung dapat diselesaikan tepat waktu. Perbaikan akses jalan menjadi isu strategis yang membutuhkan keputusan tingkat tinggi melalui rapat koordinasi dengan Dirjen Bina Marga dan Kementerian terkait. Dengan penyelesaian kendala ini, diharapkan Rumah Khusus Pejuang eks Timor Timur dapat berfungsi optimal sebagai hunian yang layak dan memberikan kepastian tempat tinggal bagi para penerima manfaat, sebagai bentuk penghargaan atas jasa mereka kepada negara.

B. Realisasi Anggaran

Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman pada periode Oktober – Desember 2025 menggunakan sisa anggaran dari Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Adapun realisasi anggaran hingga akhir tahun adalah sebesar xx persen. (Rp xxx dari pagu Rp xxx) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Realisasi Anggaran

Kode	Program	Pagu Efektif (Setelah Automatic Adjustment)	Realisasi	Persentase
WA	Dukungan Manajemen	Rp 2.312.885.000,00	Rp 2.306.962.633,00	99,74%
CL	Koordinasi	Rp 11.851.313.000,00	Rp 11.821.319.411,00	99,75%
TOTAL		Rp 14.164.198.000,00	Rp 14.128.282.044,00	99.75%

C. Efisiensi Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Kondisi sumber daya manusia di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Saranan Permukiman hingga akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Eselon I : 1 orang (Pelaksana Tugas);
2. Eselon II : 5 orang (1 kosong)
3. Jabatan Fungsional Ahli Madya:9 orang (8 kosong);
4. Jabatan Fungsional Ahli Muda: 2 orang
5. Jabatan Fungsional Ahli Pertama:23 orang;
6. Pelaksana: 2 orang;
7. Tenaga Kerja Kontrak: 8 orang.

Walaupun masih terdapat posisi Jabatan yang belum terisi, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Saranan Permukiman tetap berupaya mempertahankan capaian kinerja yang ada. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan melalui program diklat, pelatihan maupun *Workshop*.

2. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja dari kegiatan operasional sehari-hari diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) untuk kearsipan dan persuratan;
2. Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) untuk keuangan;
3. Aplikasi MyASN dan E-Kinerja Badan Kepegawaian Negara untuk kepegawaian;
4. Aplikasi SIK-M dan E-Monev Bappenas untuk monitoring kinerja;
5. Website Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan;
6. Marves Core, Marves HR, Cloud Maritim dan Webmail Maritim untuk akun personal kedinasan pegawai.

3. Sarana dan Prasarana

Data sarana dan prasarana berstatus Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan pada Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Saranan Permukiman disampaikan sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	
		SAYAP UTARA	SAYAP SELATAN
1	PC	14	7
2	Printer	11	3
3	Scanner	1	0
4	Router	1	4
5	Meja	17	16
6	Kursi	69	54
7	Lemari	35	20
8	Telephone	2	6
9	Partisi	7	2
10	CCTV	1	2
11	Meja Rapat	1	0

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	
		SAYAP UTARA	SAYAP SELATAN
12	AC Split	0	5
13	Portable AC Cassette	0	2
14	Televisi + Bracket	0	6
15	Dispenser	1	1
16	Kulkas	0	3
17	Sofa	0	7
18	Apar	0	1
19	Microwave	0	1
20	Coffee Maker	1	0
21	Proyektor	1	0
22	Pemanas Air	1	0

DAFTAR LAINNYA	BARANG	JUMLAH
	Mobil	3
	Sepeda Motor	1
	Notebook/Laptop	44

Tabel 3. 2 Daftar Barang Milik Negara pada Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Saranan Permukiman.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya percepatan penyelesaian isu oleh Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman telah dilakukan melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang intensif terhadap seluruh program *Quick Wins*. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan program dapat segera diatasi sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Dengan pendekatan yang terstruktur dan berbasis hasil, program-program ini diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan hunian layak serta mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur perumahan di berbagai daerah.
2. Tantangan dalam penyediaan 3 juta rumah per tahun mencakup berbagai aspek, mulai dari ketersediaan lahan yang terbatas, proses perizinan yang kompleks, hingga pembiayaan yang memerlukan dukungan besar. Oleh karena itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pembiayaan dan investor swasta, menjadi langkah strategis yang harus diperkuat. Dengan adanya skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan inovatif, serta kemitraan dengan sektor swasta, pemerintah dapat memastikan bahwa target pembangunan rumah dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

B. Tindak Lanjut

1. Guna memastikan efektivitas dan kesinambungan program yang dijalankan diperlukan perencanaan kinerja yang lebih komprehensif. Saat ini, penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan tengah dilakukan dengan mengacu pada program Asta Cita Kabinet Merah Putih serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Penyelarasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap inisiatif dan kebijakan yang diambil dapat mendukung tujuan pembangunan nasional di sektor perumahan dan permukiman. Dengan adanya perencanaan yang lebih sistematis, capaian kinerja dapat lebih terukur, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

2. Sebagai bagian dari upaya mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait. Koordinasi yang erat ini bertujuan untuk meningkatkan akses rumah tangga terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Selain itu, kebijakan perumahan akan terus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan tantangan di lapangan agar dapat memberikan solusi yang efektif dan tepat sasaran.